

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM) TIDAK TEPAT SASARAN (STUDI KASUS DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG)

Joelya Natasha¹, M. Jacky, S.Sos., M. Si.²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISH-Unesa

joelya.19050@mhs.unesa.ac.id¹, jacky@unesa.ac.id²

Abstract

The Cash Assistance Policy for Fuel (BLT BBM) represents a strategic measure by the Indonesian government to maintain national economic stability amid the global surge in energy prices. However, in practice, the distribution of BLT BBM has encountered several issues, particularly related to mistargeting, which has led to public complaints that some individuals deemed ineligible have nonetheless received the aid. This study aims to identify forms of resistance that have emerged, describe the experiences of both recipients and non-recipients, and analyze the resulting socio-economic impacts in Sumbermulyo Village, Jogoroto District, Jombang Regency. This research employs a qualitative approach with a case study design. The subjects consist of both BLT BBM recipients and non-recipients. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with interview guidelines serving as the main research instrument. Data analysis was conducted through the stages of reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings were analyzed using James C. Scott's theory of resistance, which emphasizes the forms of everyday resistance practiced by marginalized groups against power inequalities. The results indicate two forms of resistance among the people of Sumbermulyo Village: covert resistance, expressed through murmuring, complaints, and hidden gossip; and overt resistance, manifested in direct protests toward village officials. However, these protests cannot yet be categorized as fully open resistance, as they remain unorganized. The experiences of both recipients and non-recipients reveal a shared sense of disappointment due to unclear criteria and frequent changes in recipient data. The impacts include a decline in social trust among residents, the emergence of social jealousy, and reduced community participation.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia akibat kenaikan harga energi dunia. Namun, dalam praktiknya penyaluran BLT BBM menghadapi berbagai masalah, terutama ketidaktepatan sasaran sehingga terdapat keluhan dari masyarakat yang dianggap layak justru mendapat bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi yang terjadi, menggambarkan pengalaman masyarakat penerima dan non-penerima bantuan, serta menganalisis dampak sosial ekonomi yang muncul di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat penerima dan non penerima BLT BBM. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pedoman wawancara sebagai instrumen utama. Analisis data dilakukan mulai tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori resistensi James C. Scott yang menyoroti bentuk-bentuk perlawanan masyarakat lemah terhadap ketimpangan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua bentuk resistensi masyarakat di Desa Sumbermulyo, yaitu resistensi tertutup berupa menggerutu, keluhan, dan gosip tersembunyi, sedangkan resistensi terbuka terlihat dari protes langsung kepada aparat desa, meskipun protes ini belum dapat dikatakan sebagai resistensi terbuka karena belum terorganisir. Pengalaman masyarakat penerima dan non penerima menunjukkan adanya rasa kecewa terhadap ketidakjelasan kriteria dan perubahan data penerima. Dampaknya meliputi

penurunan kepercayaan sosial antarwarga, munculnya kecemburuan sosial, dan berkurangnya partisipasi masyarakat.

Keywords: James C. Scott resistance, BLT BBM, Aid distribution, Policy inequality, Rural dynamics.

1. Pendahuluan

Permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial, khususnya terkait ketepatan sasaran, masih sering terabaikan dalam kajian akademik. Padahal, isu ini memiliki dampak sosial yang signifikan karena menyangkut keadilan distribusi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai penyaluran bantuan masih sedikit yang dapat ditemukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan pun masih berfokus pada permasalahan implementasi dan evaluasi dalam penyaluran bantuan. Sebaliknya, permasalahan dalam penyaluran bantuan hampir selalu muncul bahkan dalam bentuk yang berbeda, salah satunya resistensi masyarakat. Resistensi muncul diakibatkan oleh penyaluran bantuan yang memicu respon yang berbeda-beda pada masyarakat. Maka, inilah yang menjadi permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian.

Penyaluran bantuan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi yang cukup kompleks. Setelah sempat mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19, perekonomian mulai pulih dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Adanya potensi naiknya harga komoditas menjadi tanda positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia (Dano, 2022).

Kenaikan harga minyak dunia berpengaruh terhadap harga minyak mentah Indonesia sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa dipastikan meningkat. Inflasi harga komoditas energi semakin membebani APBN. Salah satu alternatif untuk mengurangi beban APBN tersebut adalah mengurangi subsidi BBM dan menetapkan kebijakan baru, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan BLT BBM merupakan solusi untuk mengatasi dampak inflasi sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022. BLT BBM merupakan dana tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan akibat kenaikan harga BBM, sehingga tetap dapat membeli bahan bakar yang dibutuhkan tanpa terlalu terbebani oleh kenaikan BBM (Salam et al., 2023). Bantuan yang dialokasikan sebesar 24,17 triliun terdiri dari dua bentuk bantuan. Pertama bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 600.000 sasaran 14,6 juta pekerja dengan gaji dibawah 3,5 juta. Kedua BLT BBM kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar 150.000 per bulan, diterima sebanyak empat bulan (Syakibah, 2023).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyaluran BLT BBM berupaya berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten atau Kota terkait. Berdasarkan data resmi dari situs pemerintah JombangKab.go.id, pada tahap pertama terdapat 105 ribu keluarga penerima BLT BBM, sementara tahap kedua mencapai 112 ribu keluarga penerima (Radar Jombang, 2022). Dengan demikian, warga Desa Sumbermulyo termasuk salah satu penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Dibalik keberhasilan dan manfaat dari pelaksanaan program BLT BBM, nyatanya tidak terlepas dari polemik yang seringkali menimbulkan masalah baru bagi pemerintah. Mulai dari penyaluran bantuan yang tidak merata, munculnya peluang untuk penyalahgunaan bantuan dengan tujuan lain, hingga permasalahan bantuan yang tidak tepat sasaran. Dilansir dari (Indonesia, 2022),

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Sosial (TNP2K) menjelaskan bahwa pemerintah mendeteksi sebanyak 1,3 juta orang salah sasaran atau *exclusion error* dalam penyaluran BLT BBM.

Ketidaktepatan penyaluran BLT BBM dapat dilakukan dengan membandingkan daftar penerima manfaat (KPM) dengan data masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta melalui konfirmasi langsung di lapangan. Kesalahan sasaran ini dapat terdeteksi melalui dua bentuk, yaitu *inclusion error* dan *exclusion error*. Apabila nilai *inclusion error* tinggi artinya banyak penerima bantuan bukan berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, sedangkan *exclusion error* tinggi ketika banyak keluarga miskin justru tidak mendapatkan bantuan. Proses identifikasi dilakukan melalui pengecekan ulang data penerima berdasarkan NIK dan KK, wawancara terhadap warga yang merasa tidak menerima bantuan meski memenuhi kriteria miskin, serta analisis kesesuaian kondisi ekonomi penerima dengan kriteria kemiskinan menurut Kementerian Sosial. Selain itu, verifikasi sosial dilakukan melalui musyawarah desa dan konfirmasi kepada perangkat desa setempat untuk memastikan akurasi data penerima (Sulaksono et al., 2013)

Ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial ini kemudian menimbulkan keresahan, mendorong masyarakat untuk bertindak. Masyarakat mengajukan berbagai protes mulai dari ketidakadilan bantuan yang diberikan, kurangnya informasi dari pemerintah akan adanya program BLT BBM terutama untuk para masyarakat yang tergolong lansia. Masyarakat juga merasa terdapat kesalahan dalam pendataan penerima bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya keluarga tergolong mampu menerima program BLT BBM. Situasi ini menimbulkan keresahan, protes, dan dugaan adanya nepotisme dan proses pendataan penerimaan manfaat. Warga bahkan melaporkan kasus bantuan yang tidak cair padahal nama penerima tercantum dalam daftar penerima manfaat (DetikJatim, 2022) (Radar Jombang, 2022). Fenomena yang terjadi mencerminkan adanya resistensi masyarakat terhadap program BLT BBM yang dinilai tidak tepat sasaran. Resistensi dapat muncul dari pemahaman yang benar atas perubahan yang terjadi atau sebaliknya karena ketidakpahaman atas perubahan tersebut (Laihad et al., 2019).

Munculnya resistensi di masyarakat terhadap program BLT BBM sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor masyarakat itu sendiri, melainkan juga karena lemahnya tata kelola pemerintah. Ketidaktepatan data penerima manfaat menjadi pemicu utama yang menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pendataan, lemahnya koordinasi antarperangkat desa, serta komunikasi pemerintah yang belum merata menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan penerima bantuan. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap aparat desa maupun pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi bentuk resistensi sosial.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian terdahulu

Kajian mengenai resistensi dalam bantuan sosial masih sedikit ditemukan, maka penulis mengambil beberapa penelitian yang mengangkat teori yang serupa, yakni resistensi. Penelitian dari Elsa Fitrianita menunjukkan bahwa resistensi nelayan Menganti Kisik terjadi akibat kerugian yang dirasakan pada sektor sosial, ekonomi, dan fisik akibat pembangunan PLTU Cilacap. Nelayan memilih resistensi secara tertutup dan perlawanan kolektif. Bentuk resistensi nelayan seperti perbedaan persepsi nelayan dalam menyikapi pembangunan PLTU, ekspresi resistensi, dan

kontroversi ganti rugi. Dampak dari ini para nelayan membentuk sebuah organisasi sosial bernama KUPM Menganti Kisik yang dimanfaatkan sebagai wadah perlawanan bersama. Penyelesaiannya dicapai melalui dialog dengan nelayan, nelayan menyatakan memaklumi atas pembangunan PLTU Cilacap.

Penelitian dari Hendri Kurniawan menunjukkan ketika pemuda pengelola pariwisata berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap pariwisata halal di Sembalun Lawang mendapatkan penolakan terbuka dari komunitas agama Jamaah Tabligh dibawah pimpinan Abu Shofa. Resistensi tertutup sudah muncul sejak pertama kali Gunung Rinjani membuka pendakian.

2.2 Teori resistensi James C. Scott

Studi resistensi oleh Scott ini cukup kompleks karena menggabungkan beberapa tradisi teoritis seperti kontroversi politik yang berhubungan dengan negara dan masyarakat, serta bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar, mereka kehilangan hak atas tanah karena dikuasai oleh kaum borjuis. James C. Scott, dalam bukunya *Peasant Resistance*, mengartikan perlawanan sebagai berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok rentan terhadap penguasa, yang tujuannya adalah untuk mereduksi atau menolak segala tuntutan atau tuntutan yang merugikan pihak yang lemah haknya (Scott, 1993).

Menurut Scott, perlawanan muncul akibat adanya penindasan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlawanan sebagai cara masyarakat kelompok lemah untuk membela hak mereka. Alasan ini mendorong kelompok lemah untuk mempertahankan subsistensi mereka dengan menolak perubahan melalui berbagai gerakan perlawanan (Scott, 1993).

James Scott menjelaskan resistensi dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan perlawanan yang bersifat nyata serta bentuk perlawanan yang bersifat insidental pula. Bentuk resistensi secara nyata yakni memiliki sifat sistematis, terorganisir, serta bersifat kooperatif, berprinsip atau dengan kata lain tanpa pamrih, memiliki akibat revolusioner atau mengandung beberapa gagasan serta tujuan dalam meniadakan dominasi penindasan. Sementara dalam bentuk resistensi yang bersifat insidental ini lebih cenderung tidak terorganisasi, tidak sistematis serta individualistis, memiliki sifat untung-untungan dan berpamrih serta juga tidak memiliki akibat dalam bentuk revolusioner. Resistensi insidental biasanya dilakukan secara individu melalui aksi pembangkangan atau tindakan yang memicu kekacauan karena sifatnya yang tidak terorganisasi dengan baik (Scott, 1993).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami fenomena resistensi masyarakat terhadap penyaluran BLT BBM di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengonseptualisasikan, mengkategorikan, dan menjelaskan peristiwa berdasarkan temuan lapangan yang dikumpulkan secara simultan dengan proses analisis data. Studi kasus, sebagaimana dikemukakan Yin (1997), digunakan untuk menelaah fenomena dalam konteks kehidupan nyata ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat jelas, sehingga cocok untuk mengkaji dinamika sosial terkait distribusi bantuan sosial yang kerap menimbulkan resistensi.

Data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap penerima, non-penerima, serta aparat desa yang terlibat dalam pendataan dan penyaluran BLT BBM, serta data sekunder berupa dokumen resmi, arsip desa, media daring, dan

penelitian relevan. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang berkaitan langsung dengan pengalaman menerima atau tidak menerima BLT BBM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali perspektif informan, observasi terhadap proses penyaluran bantuan, serta dokumentasi berupa foto, rekaman, dan dokumen pendukung. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) memiliki tujuan strategis membantu perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah naiknya harga komoditas energi dunia (Gaspersz et al., 2024). Namun, nyatanya distribusi BLT BBM kerap menghadapi permasalahan. Banyak masyarakat yang protes ketika seseorang yang dianggap mampu dapat bantuan, sebaliknya seseorang yang tidak mampu tidak mendapat bantuan. Akibatnya muncul resistensi sebagai bentuk perlawanan masyarakat bawah kepada penguasa dalam hal ini pemerintah desa. Bentuk resistensi yang muncul di Desa Sumbermulyo dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu resistensi tertutup (*hidden transcript*) dan resistensi terbuka (*public transcript*) sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott (1985, 1990).

4.1 Bentuk-bentuk Resistensi Masyarakat Desa Sumbermulyo terhadap Penyaluran BLT BBM yang Tidak Tepat Sasaran

Masyarakat yang menghadapi ketidakadilan akan menggunakan *weapons of the weak*, yaitu bentuk perlawanan sehari-hari yang halus namun bermakna, seperti gosip, sindiran, atau pembangkangan kecil terhadap kebijakan yang dianggap tidak menjunjung keadilan. Dalam konteks Sumbermulyo, resistensi tertutup terlihat melalui tindakan warga yang mengeluhkan ketidaktepatan sasaran BLT BBM secara diam-diam, berbicara di lingkup keluarga atau kelompok kecil, serta menyindir dalam percakapan sehari-hari. Resistensi dalam bentuk gosip dalam obrolan perkumpulan, masyarakat saling berbagi pendapat mereka dan kebanyakan mengekspresikan ketidakpuasan terhadap situasi yang berlangsung. Meskipun terlihat tidak berbahaya, obrolan yang dihasilkan mampu mendoktrin masing-masing individu yang terlibat dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Saputra et al., 2023).

Resistensi tertutup sebagai jalan paling aman bagi mereka untuk menyuarakan harapannya (Fitrianita, 2019). Mereka memilih agar tidak menimbulkan konflik langsung dengan sesama atau pun pemerintah desa, sesuai dengan konsep *infrapolitics* yang dikemukakan Scott (1993). Temuan ini relevan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat sering menggunakan strategi resistensi tersembunyi seperti keluhan informal dan gosip sebagai cara untuk menentang ketidakadilan struktural tanpa harus menentang langsung pihak berwenang (Wahyuni et al., 2023). Fenomena serupa juga terlihat pada studi Irmayanti (2025) di Gampong Seuriweuk, Aceh Utara, di mana resistensi tertutup menjadi sarana menyalurkan frustrasi akibat pembagian bantuan yang tidak merata. Dalam kasus Sumbermulyo, bentuk resistensi tertutup ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan sementara tetap mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pemerintah desa.

Sementara itu, resistensi terbuka muncul dalam bentuk protes langsung dan permintaan klarifikasi kepada perangkat desa. Resistensi ini menurut Kusworo (1993) dalam (Haerullah, 2024) termasuk dalam resistensi semi terbuka. Resistensi ini kelanjutan dari resistensi tertutup dan warga

menghindari kerugian yang lebih besar (Isnaeni & Handoyo, 2019). Beberapa warga mendatangi balai desa untuk menanyakan alasan mereka tidak lagi menerima BLT BBM, padahal sebelumnya mereka termasuk penerima bantuan lain. Tindakan semacam ini mencerminkan transformasi dari resistensi tersembunyi ke bentuk yang lebih publik sebagaimana dijelaskan Vinthagen dan Johansson (2013), bahwa resistensi sehari-hari dapat berevolusi menjadi perlawanan terbuka ketika akumulasi ketidakadilan mencapai titik jenuh (Vinthagen & Johansson, 2013). Fenomena serupa ditemukan oleh Suci dan Widodo (2022) di Desa Klampok, di mana ketidaktepatan data penerima bantuan sosial memunculkan protes terbuka dan konflik sosial antarwarga.

Namun, resistensi terbuka di Desa Sumbermulyo tidak berkembang menjadi gerakan kolektif terorganisir. Hal ini memperkuat pendapat Scott (1985) bahwa kelompok masyarakat desa cenderung tidak melakukan perlawanan revolusioner karena keterbatasan sumber daya, posisi subordinat terhadap elite lokal, dan ketergantungan pada struktur kekuasaan desa. Resistensi yang ada lebih bersifat moral, simbolik, dan bersumber pada klaim keadilan (*moral economy*) yakni perasaan bahwa hak-hak dasar mereka diabaikan ketika bantuan diberikan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya (Ratnasari & Sudrajat, 2023).

Fenomena resistensi masyarakat terhadap penyaluran BLT BBM di Desa Sumbermulyo dapat dijelaskan melalui perspektif teori konflik yang menyoroti ketimpangan distribusi dan sumber daya dalam struktur sosial. Konflik berlaku dalam hubungan sosial yang bentuknya seperti konflik antar individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok (Sumartono, 2019). Menurut Karl Marx, masyarakat dipandang sebagai arena perlawanan, sedangkan negara dianggap sebagai pihak dalam pertentangan dengan cenderung berpihak kepada kekuatan dominan. Dalam konteks ini, pemerintah desa memegang kendali terhadap distribusi bantuan sosial sehingga memiliki posisi dominan dalam menentukan siapa yang layak mendapat bantuan, sedangkan masyarakat sebagai penerima bantuan berada pada posisi lemah yang bergantung pada keputusan pihak berwenang (Raya et al., 2024).

Ketika penyaluran bantuan dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, muncul resistensi tertutup seperti gosip, sindiran, dan keluhan informal. Tindakan-tindakan ini sebagai bentuk konflik laten karena pertentangan yang masih tersembunyi, namun menandakan ketegangan struktural akibat distribusi kekuatan yang tidak seimbang. Apabila pertentangan ini sampai menimbulkan gerakan terorganisir dari masyarakat seperti adanya demonstrasi maka menandakan perubahan dari konflik laten menuju konflik manifest, yaitu ketegangan yang semula tersembunyi mulai muncul secara langsung di ruang publik (Prayogi et al., 2025).

4.2 Pengalaman Penerima BLT BBM dalam Beradaptasi dengan Kebijakan Bantuan Pemerintah yang Berubah

Pengalaman masyarakat penerima dan non-penerima BLT BBM menunjukkan dinamika sosial yang kompleks. Banyak warga yang sebelumnya memperoleh jenis bantuan lain, seperti BLT Dana Desa atau PKH merasa kecewa ketika mereka tidak lagi tercantum sebagai penerima BLT BBM. Kekecewaan tersebut tidak semata karena hilangnya manfaat ekonomi, tetapi karena proses administratif yang tidak jelas dan dianggap sarat praktik ketidakadilan. Apabila ditinjau lebih dalam masyarakat yang telah menerima bantuan bentuk lain sangat wajar ketika tidak menerima BLT BBM sesuai dengan persyaratan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM.

Masyarakat non-penerima di Sumbermulyo menganggap bahwa perubahan kebijakan bantuan tanpa sosialisasi yang memadai menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas

pemerintah desa. Menurut penelitian meskipun bantuan disalurkan dengan cepat, ketidaktepatan sasaran menimbulkan kecemburuan sosial dan persepsi adanya kecurangan dalam pendataan penerima sehingga memunculkan sikap apatis dan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam desa (Nafiah & Bharata, 2021) (Waruwu et al., 2023). Selain itu, pada teori strukturasi Anthony Giddens menawarkan penjelasan bahwa terlihat *"duality of structure"*: di satu sisi, struktur birokrasi membatasi warga, tetapi di sisi lain, warga memiliki *"agency"* untuk beradaptasi, mempelajari prosedur, dan bahkan menolak secara halus, yang pada akhirnya dapat mereproduksi atau bahkan mengubah struktur itu sendiri.

Meski begitu, masyarakat Sumbermulyo menunjukkan kapasitas adaptif administratif. Mereka mulai memahami prosedur pengajuan ulang bantuan, mencari informasi ke dinas sosial, mengurus dokumen kependudukan, dan mengajukan keberatan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa resistensi tidak selalu destruktif, tetapi juga menjadi bentuk kesadaran baru terhadap hak-hak administratif warga negara (Vinthagen & Johansson, 2013). Kesadaran sosial tersebut memperlihatkan perubahan perilaku warga desa dari yang semula pasif menjadi partisipatif, meskipun motivasinya dilandasi pengalaman ketidakadilan.

Dalam konteks teori nepotisme, pengalaman ini menunjukkan keterkaitan antara resistensi dan relasi patron-klien di tingkat lokal. Ketika warga menduga bahwa distribusi BLT BBM dipengaruhi oleh kedekatan dengan pemerintah, muncul persepsi bahwa bantuan tidak lagi berdasarkan kebutuhan tetapi pada hubungan sosial. Dalam (Puansah, 2025) menegaskan bahwa praktik nepotisme dalam pemerintahan desa sering kali menjadi akar ketimpangan birokrasi dan sumber resistensi moral masyarakat. Hal ini juga diperkuat dalam (Kaffah et al., 2023) di Kabupaten Kuantan Singingi yang menunjukkan bahwa nepotisme secara signifikan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah desa. Dalam kasus Sumbermulyo, persepsi seperti itu membuat warga yang tidak memiliki kedekatan sosial dengan aparat merasa termarginalkan dan kemudian melakukan resistensi baik secara diam-diam maupun melalui aksi simbolik.

4.3 Dampak Penghentian Program BLT BBM terhadap Kehidupan Masyarakat

Dampak penghentian atau ketidaktepatan BLT BBM dapat dilihat dari dua aspek yaitu ekonomi dan sosial. Berdasarkan aspek ekonomi, warga yang kehilangan akses terhadap BLT BBM mengalami penurunan daya beli dan peningkatan beban pengeluaran, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nasrullah dan Annisa (2021) yang menemukan bahwa meskipun bantuan sosial seperti BLT dapat meningkatkan kesejahteraan penerima, ketidaktepatan sasaran membuat manfaat ekonomi tersebut tidak merata (Nasrullah & Annisa, 2021). Adanya BLT BBM dianggap sebagai angin segar bagi masyarakat menengah ke bawah ketika harga barang dan jasa meningkat akibat naiknya komoditas energi (Sukmana, 2021). Bantuan ini dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan seperti membayar listrik, uang saku anak, membeli kebutuhan sehari-hari, atau disimpan sebagai dana darurat. Akan tetapi, warga yang dulunya mengandalkan bantuan untuk menopang kebutuhan harian kini harus mencari alternatif lain, seperti berutang atau mengurangi konsumsi.

Sementara itu, dari sisi sosial, resistensi akibat ketidaktepatan distribusi bantuan menimbulkan fragmentasi sosial di masyarakat desa. Penerima bantuan yang salah sasaran kerap dianggap "beruntung karena dekat dengan pemerintah," sedangkan non-penerima merasa dikucilkan dari struktur sosial lokal. Akibatnya, muncul kecemburuan sosial, gosip negatif, hingga menurunnya partisipasi warga dalam kegiatan kolektif desa. Studi Suci dan Widodo (2022) mencatat bahwa kondisi seperti ini menciptakan "lingkaran apatisme sosial," di mana warga tidak lagi percaya bahwa

forum desa dapat memperbaiki keadilan sosial. Situasi ini menciptakan *trust deficit* yang pada akhirnya memperlemah efektivitas kebijakan sosial di masa depan. Dalam jangka panjang, memori kolektif atas ketidakadilan tersebut berpotensi melahirkan resistensi baru ketika program bantuan serupa diluncurkan kembali (Lilja & Vinthagen, 2018). Dengan kata lain, dampak sosial resistensi tidak berhenti pada momen konflik, tetapi membentuk warisan emosional dan politik yang dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program bantuan berikutnya.

5. Kesimpulan

Resistensi tertutup lebih banyak ditemukan di desa Sumbermulyo. Hal ini dikarenakan oleh struktur masyarakat desa setempat yang cenderung menghindari konflik secara langsung dengan sesama ataupun perangkat desa. Hal ini kemudian sejalan dengan pemikiran Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak*. Scott menyebutkan bahwa masyarakat melakukan perlawanan sehari-hari yang halus namun bermakna, seperti gosip, sindiran, atau pembangkangan kecil terhadap kebijakan. Resistensi dilakukan secara tersembunyi dan melalui cara-cara yang *subtle* sehingga tidak memicu perlawanan balik dari pihak lain.

Selain itu, pengalaman penerima dan non-penerima BLT BBM menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme penyaluran bantuan, terutama karena banyaknya warga yang dinilai lebih mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin tidak terdaftar. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial antarwarga, munculnya kecemburuan sosial, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ketidaktepatan sasaran dan lemahnya tata kelola pendataan dapat memicu resistensi sosial yang memengaruhi harmoni dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Secara ekonomi, warga non-penerima mengalami penurunan daya beli dan peningkatan beban biaya hidup akibat kenaikan harga BBM. Sebagian mengaku harus mengurangi konsumsi pangan, menunda pembayaran sekolah anak, atau berutang di warung untuk memenuhi kebutuhan harian. Secara sosial, muncul jarak emosional antara penerima dan non-penerima bantuan. Di beberapa dusun terjadi gosip dan tuduhan bahwa penerima bantuan “orang dekat perangkat desa”, yang berujung pada menurunnya rasa saling percaya antarwarga. Hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa pun menjadi renggang; warga mulai skeptis terhadap kebijakan bantuan berikutnya dan enggan berpartisipasi dalam forum desa karena merasa suara mereka tidak berpengaruh.

Daftar Pustaka

- Dano, D. (2022). Analisis Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 306–312.
- Fitriantita, E. (2019). Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Universitas Diponegoro.
- Gaspersz, P. C., Sialana, F., & Tuharea, J. (2024). Upaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Negeri Nakupia Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Akuntansi Hukum Dan Edukasi*, 1(2), 176–185. <https://doi.org/10.57235/jahe.v1i2.3622>
- Haerullah. (2024). Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jurasic park. 47–53.
- Kaffah, F., Desbanita, I., & Hafizah, A. (2023). Nepotisme Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus

- Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021 Nepotism in Village Government: A Case Study of Government Administration In Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 22(01), 103–113. <https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449>
- Laihad, R. A., Lengkong, V. P., & Saerang, R. T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mnyebabkan Resistensi Dalam Proses Perubahan Organisasi Di Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara, Gorontalo Dan Maluku Utara Di Manado Analysis of Factors That Cause Resistance in the Process of Organizational Change in the Fin. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 531–540. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/22442/22135>
- Lilja, M., & Vinthagen, S. (2018). Dispersed resistance: unpacking the spectrum and properties of glaring and everyday resistance. *Journal of Political Power*, 11(2), 211–229. <https://doi.org/10.1080/2158379X.2018.1478642>
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). *The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx ' s Thought*. 1(1), 1–11.
- Puansah, I. (2025). *Praktik Nepotisme pada Pemerintahan Desa*.
- Radar Jombang. (2022). Penyaluran BLT BBM Semrawut, Dinsos Segera Lapor Kemensos. *Radar Jombang*. <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/661025517/penyaluran-blt-bbm-semrawut-dinsos-segera-lapor-kemensos>
- Ratnasari, D., & Sudrajat, A. (2023). Resistensi Masyarakat Desa Gajah Terhadap Pembongkaran Punden Desa Gajah. *Paradigma*, 12(3), 2023.
- Salam, R. R., Jamil, M. F., Ibrahim, Y., Rahmadden, R., Soni, S., & Herianto, H. (2023). Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Menggunakan Support Vector Machine. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 3(1), 27–35. <https://doi.org/10.57152/malcom.v3i1.590>
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sukmana, H. (2021). Pengaruh bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai selama pandemi Covid-19 terhadap kelangsungan hidup masyarakat. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 176–186. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.5777>
- Sulaksono, B., Mawardi, M. S., Utari, V. Y. D., Widyaningsih, D., & Prasetyo, D. D. (2013). Penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013. *Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Smeru*.
- Sumartono. (2019). Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, 5, h 4-7.
- Syakibah, M. (2023). *Dampak Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Pakujaya Kota Tangerang Selatan Tahun 2022*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Vinthagen, S., & Johansson, A. (2013). "Everyday Resistance": Exploration of a Concept and its Theories. *Resistance Studies Magazine*, 1, 1–46. <http://rsmag.nfshost.com/wp-content/uploads/Vinthagen-Johansson-2013-Everyday-resistance-Concept-Theory.pdf>
- Wahyuni, S., Fakhurrazi, F., Rangkuty, R. P., & Saifuddin, S. (2023). Resistensi Masyarakat Terhadap Kawasan Industri Medan. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(1), 74–82.
- Waruwu, I. N., Telaumbanua, E., Zega, Y., & ... (2023). Analisis Perilaku Apatis Masyarakat Desa Faekhu Untuk Berpartisipasi Pada Kepengurusan Bumdes Fowua Di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. *Innovative: Journal Of ...*, 3(3), 497–508. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6311%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6311/4409>